

DAMPAK PERTENTANGAN DIAMETRAL DAN STRATEGI PEMERINTAH PADA TAX EVASION (Studi Pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Kotamadya Malang)

Risnaningsih dan Sheny Tanuwidjaja

Program Studi Akuntansi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

Email: ningsihrisna@yahoo.com

ABSTRACT

Diametric contradiction by Halim means that the tax authorities as the beneficiary in the process of tax revenue, will always strive to achieve the target revenue into the state coffers as much as possible. On the other hand, the community taxpayers, who should be paying taxes without getting any refund due payment services directly it does, will seek to reverse that is looking for ways to reduce the tax payable to be paid to the state treasury. The results of the research that has been done on the Civil Service Office of the District Municipality of Malang said that the positive impact of diametric opposition to tax evasion is 23.1 % of the 65 respondents felt enthusiastic about paying taxes every year, respondents reported the tax in accordance with the facts, and also by looking at the tax realtor cases in Indonesia , the respondent continued to pay taxes each year without being affected by the case. While the negative impacts is that although the respondents already know about taxes but 7.7% of respondents in filling the Annual Tax (SPT) still use the help of others as respondents still having trouble filling the Annual Tax (SPT). Although respondents already know about taxes but the majority of respondents still much that delinquent taxes in the amount of 7.7 % . Strategy by the government so that the individual taxpayer are excited to pay taxes is to increase knowledge about taxes, there should be openness in Government Officers

Keywords : *Diametric Contradiction , Tax , Tax Evasion*

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai karakteristik hubungan searah, dimana pihak yang satu mempunyai kewajiban membayar, namun pihak yang lain tidak mempunyai kewajiban apapun secara langsung terhadap pihak yang membayarnya tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan kepentingan antara pemungut pajak yang kemudian menimbulkan pertentangan diametral (Brotodihardjo, 1992:2). Sedangkan menurut Halim (2005:50) pertentangan diametral berarti bahwa fiskus sebagai pihak yang diuntungkan dalam proses penerimaan pajak, akan selalu berusaha untuk mencapai target pemasukan ke dalam kas negara sebesar-besarnya. Dan di lain pihak, masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung akibat pembayaran yang dilakukannya, akan berupaya sebaliknya yaitu mencari cara agar dapat mengurangi pajak terutang yang harus dibayar kepada kas negara. Hal ini terjadi karena dari sudut pandang pembayar pajak, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba atau kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong munculnya perencanaan pengurangan pajak yang harus dibayar.

Tujuan dari Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah mengurangi jumlah pembayaran pajak yang dapat dilakukan dengan *Tax Avoidance* maupun dengan *Tax Evasion*. Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berbeda. *Tax avoidance* diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah–celah (*loops*) dari peraturan–peraturan dan perundang–undangan perpajakan yang berlaku di negara tempat masyarakat pembayar pajak berada (Harahap, 2003:23). Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat

seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (*www.irs.com, 2005*).

Penelitian mengenai *tax evasion* pernah dilakukan oleh Andres (2002) di Argentina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah wajib pajak akan menjadi cemas jika diperiksa pajaknya. Kegairahan untuk membayar pajak jauh lebih rendah lagi pada kasus *tax evasion*, karena perilaku tersebut illegal. Ada pendapat bahwa *tax evasion* memang merupakan ciri perilaku yang agak umum pada manusia. Menurut prinsip perilaku ekonomi yang dikemukakan oleh Neumann & Morgenstern (Lewis, 1982) manusia memang cenderung berusaha mengurangi jumlah pajak yang dibayarnya dengan cara melaporkan sesedikit mungkin penghasilannya yang terkena pajak.

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun serta 57 kelurahan.

Dari sisi penerimaan APBD kota Malang pada tahun 2001, penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan merupakan yang terbesar yaitu sekitar 81% atau sekitar 218,6 milyar dari sekitar 267,6 milyar, sedangkan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah menyumbang sekitar 9% atau sekitar 25,6 milyar. Sedangkan penerimaan lain yaitu sebesar 5,7 milyar yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu.

Dari sisi pengeluaran, anggaran terbesar, diperuntukkan bagi belanja rutin yaitu hampir sekitar 77% atau sekitar 208,6 milyar, sedangkan untuk belanja pembangunan, dialokasikan hanya sebesar 58,9 milyar atau sekitar 23%. Dengan alokasi dana pembangunan yang cukup kecil dibandingkan dengan alokasi untuk belanja rutin, salah satu pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran belanja seperti sebagai berikut; Belanja pembangunan difokuskan pada sektor yang bersifat *cost recovery*.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Malang perlu ditingkatkan seiring dengan berlakunya UU tentang Otonomi Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang selama ini ada, selain berusaha menciptakan sumber-sumber pendanaan baru, baik dari penerimaan sektor pajak maupun perusahaan daerah. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah pajak penghasilan 21 yang dibayar oleh Pegawai Negeri Sipil golongan III dan IV yang bekerja di Kantor Kecamatan Kotamadya Malang. Peneliti ingin mengetahui dampak positif maupun negatif dari pertentangan diametral pada *tax evasion* serta strategi yang dilakukan pemerintah agar Wajib Pajak Orang Pribadi merasa antusias dalam membayar Pajak.

METODE PENELITIAN

Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Kantor Kecamatan di Kotamadya Malang dan memiliki golongan III dan IV sebanyak 65 responden dan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Responden

No	Nama Kantor	Responden (orang)
1	Kecamatan Lowokwaru	15
2	Kecamatan Blimbing	15
3	Kecamatan Kedungkandang	11
4	Kecamatan Sukun	12
5	Kecamatan Klojen	12
	Jumlah	65

Sumber: Kantor Kecamatan Kodya Malang 2013

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dan menyebarkan kuesioner kepada responden, disertai dengan wawancara (*Interview*). Setelah itu kuesioner dihitung dengan skala nominal yaitu pemberian skala dimana skala digunakan hanya untuk membedakan suatu ukuran dari ukuran lain tanpa memberi atribut lebih besar atau lebih kecil. Jadi sifat skala ini adalah sejajar atau sama antara masing-masing skala. (Santosa dan Ashari, 2005:4) Dimana pendapat “ya” diberi skala 1 dan “tidak” diberi skala 2.

Hasil kuesioner dihitung dengan menggunakan *SPSS versi 16* untuk mengetahui rata-rata (*mean*) sehingga peneliti bisa mengetahui berapa prosentase responden yang mengetahui tentang pajak. Dan juga melihat dampak positif dan negatifnya dari pertentangan diametral pada *tax evasion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak dari Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lima kecamatan kotamadya Malang, maka dampak positifnya dari pertentangan diametral pada *tax evasion* adalah 23,1% dari 65 responden merasa antusias dalam membayar pajak setiap tahunnya, responden melaporkan pajak sesuai dengan kenyataan yang ada, dan juga dengan melihat kasus-kasus makelar pajak yang terjadi di Indonesia, responden tetap membayar pajak setiap tahunnya tanpa terpengaruh dengan kasus tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Kuesioner Di Kec. Lowokwaru, Blimbing, Kedungkandang, Sukun, dan Klojen

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7.7	7.7	7.7
	1	7.7	7.7	15.4
	1	7.7	7.7	23.1
	3	23.1	23.1	46.2
	1	7.7	7.7	53.8
	1	7.7	7.7	61.5
	1	7.7	7.7	69.2
	1	7.7	7.7	76.9
	1	7.7	7.7	84.6
	1	7.7	7.7	92.3
	1	7.7	7.7	100.0
	13	100.0	100.0	

Sumber: Olahan, 2013

Sedangkan dampak negatifnya adalah walaupun responden sudah mengetahui tentang pajak tetapi sebanyak 7,7% responden di dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih menggunakan bantuan orang lain karena responden masih kesulitan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Selain itu walaupun responden sudah mengetahui tentang pajak tetapi sebagian responden masih banyak yang menunggak pajak yaitu sebesar 7,7%

Strategi Pemerintah Agar Wajib Pajak Orang Pribadi Merasa Antusias Membayar Pajak

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah agar Wajib Pajak Orang Pribadi merasa antusias membayar pajak adalah: pertama, Meningkatkan pengetahuan tentang pajak. Untuk meningkatkan

pengetahuan tentang pajak, sebaiknya Kantor pajak menyediakan mobil yang bergerak dari rumah ke rumah untuk mengantarkan informasi tentang pajak seperti yang dilakukan di Australia. Di Amerika Serikat dan Kanada ada pelayanan telepon cuma-cuma untuk menanyakan perihal pajak. Pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain, khususnya untuk penyimpangan dalam jumlah yang besar.

Kedua, Hendaknya ada Keterbukaan Pada Petugas Pemerintahan. Petugas pemerintahan adalah orang yang sering menjadi panutan masyarakat. Kalau petugas pemerintahan telah membayar pajak dengan baik, maka besar kemungkinan masyarakat akan mengikuti jejaknya. Dalam hal ini membayar pajak hendaknya ada sikap keterbukaan. Di Amerika Serikat rakyat dapat mengetahui berapa besar pajak yang dibayar oleh para senator, para menteri dan pejabat yang lainnya. Kalau ada sikap keterbukaan seperti yang telah dilakukan di Amerika Serikat, maka masyarakat di Indonesia akan merasa antusias dalam membayar pajak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lima kecamatan kotamadya Malang, maka dampak positifnya dari pertentangan diametral pada *tax evasion* adalah 23,1% dari 65 responden merasa antusias dalam membayar pajak setiap tahunnya, responden melaporkan pajak sesuai dengan kenyataan yang ada, dan juga dengan melihat kasus-kasus makelar pajak yang terjadi di Indonesia, responden tetap membayar pajak setiap tahunnya tanpa terpengaruh dengan kasus tersebut. Sedangkan dampak negatifnya adalah walaupun responden sudah mengetahui tentang pajak tetapi sebanyak 7,7% responden di dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masih menggunakan bantuan orang lain karena responden masih kesulitan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Selain itu walaupun responden sudah mengetahui tentang pajak tetapi sebagian responden masih banyak yang menunggak pajak yaitu sebesar 7,7%.

Strategi yang dilakukan pemerintah agar Wajib Pajak Orang Pribadi merasa antusias membayar pajak adalah meningkatkan pengetahuan tentang pajak, hendaknya ada keterbukaan pada Petugas Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ancok, Djamaludin. 2004. *Mengapa Orang Kurang Antusias Membayar Pajak*. Yogyakarta: Darussalam.
- Andres, Luis. 2002. *Determinants of Propensity to Tax Evasion: The Argentinean Case*. University of Chicago.
- Ayu, Stephana Dyah dan Rini Hastuti. 2009. *Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan dan Kecenderungan Personal*. *Kajian Akuntansi* ISSN: 1979-4886. Volume 1 Nomor 1 Hal 1-12.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1981. *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: Penerbit Eresco.
- Cooper, D.R, dan C.W. Emory. 1996. *Business Research Methods*. 5th edition. Richard D. Irwin Inc., USA.
- Gravelle, Jane G. 2013. *Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion*. Congressional Research Service.
- Halim, Abdul. 2005. Secara Legal: Bolehkah Tax-Avoidance? *Usahawan* XXXIV.
- Harahap, Abdul Asri. 2003. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta: Integrita Dinamika Preas.
- Kasipillai, J., and H. A. Jabbar. 2006. Gender and Ethnicity Differences In Tax Compliance. *Asian Academy of Management Journal* 11 (2): 73-88.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metodelogi Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Larry dkk. 1994. *Dictionary of Tax Terms*. New York: Barron's Bussiness.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nazir, Moh..2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
PPA FE UMY. 2006. Materi workshop matakuliah dan praktikum akuntansi manajemen pemerintah daerah untuk dosen akuntansi sektor publik.